



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

RENCANA KERJA TAHUNAN (RENJA) TAHUN 2017

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MERANGIN**



**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK**

KABUPATEN MERANGIN

Jalan Pemuda Komp. IBRD KM. 2 Bangko

Telp./fax. (0746) 21185

2017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	I.1. Latar Belakang	1
	I.2. Landasan Hukum	4
	I.3. Maksud dan Tujuan	10
	I.4. Sistematika Penulisan	11
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	15
	II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	15
	II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	22
	II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	24
	II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	28
	II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	28
BAB III	TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	30
	III.1. Tujuan dan Sasaran Renja OPD	30
	III.2. Program dan Kegiatan	35
BAB IV	PROGRAM DAN KEGIATAN	41
	IV.1. Indikator Kinerja	41
	IV.2. Kelompok Sasaran	41
	IV.3. Lokasi Kegiatan	-
	IV.4. Kebutuhan Dana Indikatif, dan	-
	IV.5. Sumber Dana	-
BAB V	PENUTUP	43

LAMPIRAN : RENCANA KERJA (RENJA) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. MERANGIN TAHUN 2017
 JADWAL PELAKSANAAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

NO	PROGRAM	KEGIATAN	JADWAL KEGIATAN												PENANGGUNG JAWAB		
			TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4			5			6			7			8		
A	PROGRAM/KEGIATAN KESEKRETARIATAN																
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat	
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat
		3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat
		4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat
		5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat
		6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat
		7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat
		8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat
		9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat
		10	Penyediaan Makanan dan Minuman	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat
		11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat
		12	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat
				13	Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Pembangunan Gedung Kantor	√	√	√										Bagian Sekretariat	
		2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	√	√	√										Bagian Sekretariat	
		3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	√	√	√										Bagian Sekretariat	
		4	Pengadaan Mebeleur	√	√	√										Bagian Sekretariat	
		5	Pengadaan Komputer	√	√	√										Bagian Sekretariat	
		6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat
		7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat
		8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	√	√	√											Bagian Sekretariat
		9	Pemeliharaan Rutin Berkala TMP Bangko				√	√	√								Bidang Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya				√	√	√							Bagian Sekretariat	
		2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu				√	√	√							Bagian Sekretariat	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat	
		2	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat	
		3	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat	
		4	Penyusunan Laporan Tahunan										√	√	√	Bagian Sekretariat	
		5	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran				√	√	√								Bagian Sekretariat
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan	1	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan				√	√	√	√	√	√				Bagian Sekretariat	
		2	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran							√	√	√	√	√	√	Bagian Sekretariat	
		3	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	√	√	√										Bagian Sekretariat	
7	Program Visualisasi Hasil Pembangunan	1	Penyebarnya Informasi Hasil Pembangunan							√	√	√			Bagian Sekretariat		

B. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL																	
8	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas Pendamping Sosial, Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Relinjamsos dan PK	
		2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin				√	√	√							Bidang Relinjamsos dan PK	
		3	Penyuluhan Sosial dan Pemantapan KUBE Fakir Miskin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Relinjamsos dan PK
		4	Pendataan PKH Keluarga Miskin dan Pelaksanaan Jambore PKh	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Relinjamsos dan PK
		5	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Warga Miskin				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Relinjamsos dan PK
		6	Sosialisasi Program Keluarga Harapn	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Relinjamsos dan PK
		7	Monitoring Distribusi Beras Rakyat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Relinjamsos dan PK
		8	Peningkatan Kapasitas Kinerja Suku Anak Dalam	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial
9	Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Relinjamsos dan PK	
		2	Pembinaan Satuan Penanggulangan Bencana Daerah (TAGANA)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Relinjamsos dan PK
		3	Pembinaan Suku Anak Dalam	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial
		4	Pengadaan Tanah Suku Anak Dalam				√	√	√								Bidang Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial
		5	Pembinaan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Warga SAD				√	√	√	√	√	√					Bidang Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial
		6	Penyuluhan Sosial Daerah Rawan Bencana				√	√	√	√	√	√					Bidang Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial
		7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasaran Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS				√	√	√								Bidang Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial
		8	Bantuan Barang Masjid, Pontren dan Musolla				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial
10	Program Pembinaan Anak Terlantar	1	Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan Anak tidak mampu							√	√	√			Bidang Relinjamsos dan PK		
11	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	1	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Ex Trauma							√	√	√			Bidang Relinjamsos dan PK		
12	Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo	1	Pembinaan dan Bantuan Bagi Panti				√	√	√						Bidang Relinjamsos dan PK		
		2	Pelayanan Lansia Luar Panti	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Relinjamsos dan PK	
13	Program Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial (Orang Gila, Gepeng, PSK dan Penyandang Cacat)	1	Sosialisasi dan Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba				√	√	√						Bidang Relinjamsos dan PK		
		2	Fasilitasi dan Pembinaan Penyakit Sosial (Orang gila, gepeng, PSK dan Penyandang Cacat)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Relinjamsos dan PK	
14	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1	Fasilitasi dan Pembinaan Karang Taruna	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial	
		2	Koordinasi Penyelenggaraan Komda Lansia	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial	
		3	Pelatihan Keterampilan usaha Kesejahteraan Sosial juruan Las								√	√	√	√	√	√	Bidang Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial
		4	Pelatihan Keterampilan usaha Kesejahteraan Sosial juruan Menjahit				√	√	√	√	√	√					Bidang Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial
		5	Fasilitasi peningkatan kesejahteraan bagi perintis kemerdekaan/pahlawan nasiona, veteran dan keluarganya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial

C URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
15	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	1	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Pemberdayaan Perempuan
		2	Pembinaan Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera				√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Pemberdayaan Perempuan
		3	Visualisasi Hasil Karya Perempuan				√	√	√							Bidang Pemberdayaan Perempuan
		4	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Perempuan (Tata Boga)				√	√	√							Bidang Pemberdayaan Perempuan
		5	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Perempuan (Menjahit)							√	√	√				Bidang Pemberdayaan Perempuan
16	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1	Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Pemberdayaan Perempuan	
		2	Perumusan dan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dibidang Politik dan Jabatan Publik	√	√	√	√	√	√						Bidang Pemberdayaan Perempuan	
		3	Sosialisasi Perlindungan Anak	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	
17	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1	Advokasi dan fasilitas PUG bagi Perempuan				√	√	√						Bidang Pemberdayaan Perempuan	
		2	Fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Pemberdayaan Perempuan	
		3	Workshop Peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan				√	√	√						Bidang Pemberdayaan Perempuan	
		4	Pembentukan Forum Anak Daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	
		5	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	
		6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	
		7	Pengembangan Kota Layak Anak	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T., karena atas limpahan berkah dan rahmat-Nya, sehinggadapat tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2017.

Penerbitan buku Rencana Kerja (Renja) ini bertujuan untuk menginformasikan tentang Rencana Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2017 dan sekaligus jadwal pelaksanaannya. Selain itu dengan diterbitkan buku ini diharapkan dapat menjadi acuan seluruh staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam penyusunan buku ini. Selanjutnya juga kami menyadari bahwa buku ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu apapun bentuk saran dan kritik yang disampaikan akan kami terima dengan senang hati guna perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga penerbitan buku ini memberikan manfaat bagi siapa saja yang memerlukannya.

Bangko, Januari 2017

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MERANGIN**



Dr. ARISLAN, M.Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 19590605 198611 1 001

BAB I

P E N D A H U L U A N

I.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Merangin tahun 2017 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2017 ini menyusun

Rencana Kerja Dinas. rencana SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2017, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2014 - 2018 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2014 - 2018 yaitu :

” Terwujudnya Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk berbenah Menuju Merangin Emas 2018”

Guna mewujudkan Visi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2014 – 2018 di atas, maka disusunlah Misi yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin. Dengan Misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran serta instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya. Oleh karena itu Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dirumuskan sebagai berikut :

-
1. Mewujudkan pelayanan sosial yang efektif dan efisien terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
 2. Mewujudkan peningkatan kualitas, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mendorong pembangunan.
 3. Mewujudkan peningkatan Tata Kelola Pemerintahan urusan Pemerintah Bidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2017, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin tahun 2017 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Misi Pertama Yaitu keinginan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin untuk melayani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan prioritas utama menurunkan angka kemiskinan bagi Fakir Miskin di Kabupaten Merangin, meningkatkan pembinaan bantuan perlindungan dan jaminan sosial melalui pemberian bantuan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), melakukan pembinaan bagi anak terlantar, Panti Asuhan/Jompo, Pembinaan eks penyandang masalah kesejahteraan sosial, penyandang cacat, dan penguatan kapasitas bagi lembaga kesejahteraan sosial (LKS).

Misi Kedua yaitu merupakan keinginan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin untuk Meningkatkan penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak, Meningkatkan persentase kualitas hidup anak dan perempuan melalui terapan ilmu pengetahuan dan teknologi

serta Meningkatnya persentase tenaga kerja perempuan dalam pembangunan.

Misi Ketiga Yaitu Merupakan keinginan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin untuk meningkatkan Tata Kelola Pemerintah dan penguatan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2017 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Bungo Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755).
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia

-
- Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4301);
 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

-
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
 14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 16. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 18. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 20. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 21. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);

-
22. Undang – Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 23. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
 24. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
 25. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 26. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 27. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 28. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

-
30. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 35. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
 36. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 37. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

-
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 39. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 40. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 41. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 43. Peraturan Menteri Sosial RI N0. 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota
 44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

-
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
 46. Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang RPJMD Propinsi Jambi Tahun 2016 – 2021.
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 10);
 49. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Capaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018;
 51. Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 39 Tahun 2016 tentang Ketentuan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 39);

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2017 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian

kinerja Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2017, sedangkan tujuan adalah :

1. Acuan Dinas SOSPPPA dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Merangin tahun 2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Merangin.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin selama tahun 2017.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja DINA SOSPPPA Kabupaten Merangin Tahun 2017, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja DINAS SOSPPPA, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antar Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD dengan Renja.

2.1 Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja DINAS SOSPPPA Tahun 2017.

3.1 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD.

4.1 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Menjelaskan tentang pemuatan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin yang merupakan salah satu organisasi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Merangin. sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016, serta kajian terhadap kondisi umum perencanaan saat ini yang berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai hal-hal sebagai berikut :

- Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD.
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD.
- Dampaknya terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional,

tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- Rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas SOSPPPA tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin selama tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2017. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. penetapan indikator kinerja ini diikuti

dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2016

Anggaran Tahun 2016 yang dahulu Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin sebesar Rp.2.761.288.750,- (termasuk perubahan) dengan 16 program dan 67 kegiatan. dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.742.745.078,- dengan capaian kinerja Keuangan sebesar 99%.

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2017

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2017 dengan usulan sebesar **Rp.7.078.785.000,-** terurai dalam **17** program dan **77** kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan Sumber Daya Informasi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, serta memperhatikan Perkembangan Global. untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam

Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan Di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Rencana strategis yang disusun oleh Dinas SOSPPPA merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan Kekuatan **(strengths)**, Kelemahan **(weakness)**, Peluang **(opportunities)**, dan Tantangan **(threats)** yang ada. rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) tahunan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2017, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Merangin sebagai berikut:

A. Permasalahan dalam Penyelenggaraan Bidang Sosial

1. Banyaknya fakir miskin, sementara bantuan KUBE terbatas. Hingga tahun 2016 bantuan KUBE untuk Fakir Miskin baru sudah diberikan sebanyak 614 Orang.
2. Belum akuratnya data fakir miskin
3. Masih tingginya korban bencana alam baik yang di akibatkan

-
- oleh bencana maupun ulah manusia
4. Belum optimalnya Pemberdayaan suku anak dalam (SAD)
 5. Kapasitas daya tampung panti tidak sebanding dengan jumlah PMKS yang direhabilitasi di panti
 6. Masih rendahnya Pembinaan terhadap lansia terlantar
 7. Masih banyaknya Penyandang penyakit sosial yang tidak punya Identitas lengkap sehingga tidak dapat dipulangkan ke daerah asal
 8. Masih rendahnya minat masyarakat Untuk mendirikan lembaga Kesejahteraan social (LKS), Lembaga Kesejahteraan konsultasi keluarga (LK3) dan pekerja sosial masyarakat (PSM)

B. Permasalahan dalam Penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Belum optimalnya kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG)
2. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Belum optimalnya lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Masih kurangnya Partisipasi perempuan dalam legislative
5. Masih ditemukannya perempuan sebagai petugas profesional
6. Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas SOSPPPA dalam pelaksanaan urusan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin tahun 2014 - 2018, maka strategi dan

kebijakan yang akan ditempuh Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

A. Strategi Bidang Sosial.

1. Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Fakir Miskin di Kabupaten Merangin, melalui :

- ❖ Pemberian bantuan UEF bagi keluarga rentan miskin
- ❖ Pemberian Bantuan KUBE bagi Fakir Miskin
- ❖ Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi fakir miskin
- ❖ Pendampingan manajemen usaha bagi keluarga miskin
- ❖ Peningkatan kesejahteraan TKSK dalam mewujudkan tercapainya pembangunan kesejahteraan social
- ❖ Fasilitasi masyarakat miskin sebagai peserta PKH
- ❖ Pemberian pemahaman Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat miskin
- ❖ Fasilitasi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni
- ❖ Fasilitasi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan beras rakyat

2. Peningkatan kualitas pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), melalui :

- ❖ Percepatan proses penyaluran logistic ke bencana
- ❖ Pemberian pengetahuan dan pemberian bantuan Jatah Hidup (JADUP) bagi warga Suku Anak Dalam
- ❖ Peningkatan keterampilan petugas dalam penanganan bencana
- ❖ Pembinaan dan penyuluhan social bagi KAT
- ❖ Penyiapan lokasi pemukiman bagi warga suku anak dalam
- ❖ Pemberdayaan ekonomi bagi warga SAD
- ❖ Penyediaan tenaga pendamping Suku Anak Dalam

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Bagi Anak Terlantar, melalui :

- ❖ Pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan bagi Panti Jompo, melalui :

- ❖ Pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia dalam panti
- ❖ Penyelenggaraan Komda Lansia

5. Peningkatan Kualitas Pelayanan bagi Para Penyandang Penyakit Sosial, melalui :

- ❖ Penyelenggaraan penyuluhan bahaya narkoba
- ❖ Pelayanan bagi penyakit social untuk direhabilitasi dan dipulangkan ke daerah asal

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan bagi penyandang cacat dan trauma, melalui :

- ❖ Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat
- ❖ Pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang cacat
- ❖ Pemberian bantuan nutrisi bagi ODK berat

7. Peningkatan Peran Lembaga Sosial, Organisasi Sosial kemasyarakatan lainnya guna mendorong pemberdayaan lembaga social sebagai potensi kesejahteraan Sosial, melalui :

- ❖ Mendayagunakan LKS untuk mampu meningkatkan kesejahteraan social
- ❖ Meningkatkan profesionalitas TKSM melalui pendidikan dan pelatihan
- ❖ Memberikan kemudahan dan akses pembentukan wadah penyelenggaraan kesejahteraan social

B. Strategi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan, melalui :

- ❖ Pembentukan kelembagaan PUG, Peningkatan kapasitas Pokja, Tim Teknis Pokja, Pokal Point dalam PPRG, pelatihan penyusunan PPRG dan pendampingan pelaksanaan PPRG
- ❖ Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan dan anak korban kekerasan
- ❖ Meningkatkan kualitas perempuan dalam melakukan pengambilan keputusan
- ❖ Memperkuat sistim penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data terpilah gender
- ❖ Memfasilitasi pembentukan Forum Anak Daerah dan pembinaan

-
- ❖ Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak
 - ❖ Melakukan monitoring kegiatan

2. Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader calon anggota legislatif serta sebagai pengambilan keputusan dan eksekutif dan yudikatif, melalui :

- ❖ Melakukan Pelatihan, pendidikan politik perempuan dan penyiapan kader politik
- ❖ Melakukan Sosialisasi Perlindungan Anak
- ❖ Menyediakan regulasi tentang alokasi perempuan dibidang jabatan politik dan jabatan publik

3. Peningkatan Kapasitas Perempuan sebagai Tenaga Kerja sehingga mampu bersaing dan berdayaguna, melalui :

- ❖ Pembinaan Organisasi Perempuan sehingga mampu menciptakan lapangan kerja bagi perempuan
- ❖ Peningkatan kapasitas ibu rumah tangga untuk mewujudkan keluarga sejahtera
- ❖ Peningkatan keterampilan usaha bagi kaum perempuan
- ❖ Mempublikasikan hasil karya perempuan melalui pameran dan sebagainya

C) Sasaran Pelayanan Organisasi antara lain :

1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja birokrasi, melalui :

- ❖ Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan berorientasi pada peningkatan kinerja dan kebutuhan pelayanan.
- ❖ Meningkatkan ketersediaan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur yang efektif sesuai dengan proporsi kerja yang dibebankan kepada SKPD.
- ❖ Meningkatkan disiplin aparatur melalui pemenuhan kebutuhan aparatur yang efektif dan efisien.
- ❖ Meningkatkan kualitas SDM aparatur melalui Peningkatan Kompetensi Pegawai.

-
- ❖ Meningkatkan Sistem Pelaporan Organisasi, melalui penajaman visi dan misi organisasi dan Pemerintah Kabupaten Merangin
 - ❖ Meningkatkan Sistem Perencanaan yang tepat sesuai kebutuhan pelayanan sektor publik.
 - ❖ Meningkatkan informasi ke masyarakat melalui Pameran publikasi pembangunan
 - ❖ Meningkatkan persentase sistem intern pemerintah melalui pengendalian Sistem Intern Pemerintah

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

A. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin merupakan salah satu organisasi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Merangin. sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
Terdiri dari tiga Sub Bagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
Terdiri dari tiga Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - b. Seksi Penanganan Korban Bencana
 - c. Seksi Penanggulangan kemiskinan

-
4. Bidang Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial
Terdiri dari tiga Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
 - b. Seksi Urusan Perintis Kemerdekaan, kejuangan dan kesetiakwanan
 - c. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
 5. Bidang Pemberdayaan Perempuan
Terdiri dari tiga Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG)
 - b. Seksi Kesetaraan Gender Bidang Sosial dan Ekonomi
 - c. Seksi Kesetaraan Gender Bidang Politik dan Hukum
 6. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
Terdiri Dari tiga seksi, yaitu :
 - a. Seksi Perlindungan Anak
 - b. Seksi Tumbuh Kembang Anak
 - c. Seksi Pengembangan KLA

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin, Dinas Sospppa mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah dalam Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- b. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten dan menuangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
- c. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;

-
- d. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
 - e. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
 - f. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
 - g. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak ; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Bidang tugas dan fungsinya.

II.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, merupakan pemisahan dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016, mempunyai tugas pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Merangin Nomor 39 Tahun 2016. Dalam struktur OPD baru Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin memiliki tugas : **Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan Di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.**

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin menyelenggarakan Tugas Pokok **menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan fakir miskin,**

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah dalam Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- i. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- j. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten dan menuangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
- k. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- l. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- m. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- n. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- o. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak ; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Bidang tugas dan fungsinya.

B. Sumber Daya Manusia Aparatur

Jumlah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin

Tabel 1.1 Jumlah PNS Dilingkungan Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2016

Pangkat	Jumlah	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
Pembina Tk 1	1 Orang	1	-
Pembina	4 Orang	3	1
Penata Tk 1	8 Orang	2	6
Penata	6 Orang	1	5
Penata Muda Tk 1	6 Orang	3	3
Penata Muda	1 Orang	-	1
Pengatur Tk 1	-	-	-
Pengatur	-	-	-
Pengatur Muda Tk 1	2 Orang	2	-
Pengatur Muda	4 Orang	-	4
Juru Muda	-	-	-
Jumlah	32 Orang		

2). Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tampak pada **Tabel 1.2** sebagai berikut :

Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah	Keterangan
A.	BANGUNAN DAN GEDUNG		
	- Gedung Kantor Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Merangin	1 Unit	Kondisi cukup baik
	- Rumah Dinas (Kepala)	1 Unit	Kondisi Cukup baik Aula, Tempat praktek, tempat peremuan (cukup baik).
	- Gedung Pertemuan	1 Unit	
- Gudang Logistik	1 Unit	Kondisi Cukup Baik	
B.	PERALATAN DAN MESIN		
	• Alat angkutan kendaraan roda 4	6 Unit	Cukup Baik
	• Alat angkutan kendaraan roda 2	.. Unit	Baik
	• Alat Studio dan Komunikasi		
	➤ Faxsimile	1 Unit	Baik
➤ Pesawat Telpon	1 Unit	Baik	

4). Mitra Kerja

Dalam penyelenggaraan pelayanan SKPD, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin mempunyai mitra kerja dengan berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga swasta, seperti pada **Tabel3.1**

Tabel 1.3 Mitra Kerja Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Merangin

No	MITRA KERJA	JUMLAH
I.	BIDANG SOSIAL	
1	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	10 Orang
2	Organisasi Sosial (Orsos)	2 Organisasi
3	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	50 Orang
4	Karang Taruna	215 Kt
5	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	24 orang
6	Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	1 Lembaga
7	Pekerja Sosial Profesional	32 Orang

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin. rencana kerja (RENJA) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin. di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin.

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan, LSM, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil Pengumpulan Informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada Perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. untuk itu, disusun Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. dalam hal ini, Visi dan Misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2014 - 2018. VISI Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah :

” Terwujudnya Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk berbenah Menuju Merangin Emas 2018”

Guna mewujudkan Visi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014 – 2018 di atas, maka disusunlah Misi yang menjadi tanggung jawab Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin. Dengan Misi ini diharapkan seluruh anggota

organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran serta instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya. Oleh karena itu Misi Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan sosial yang efektif dan efisien terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
2. Mewujudkan peningkatan kualitas, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mendorong pembangunan.
3. Mewujudkan peningkatan Tata Kelola Pemerintahan urusan Pemerintah Bidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2017, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2017 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Misi Pertama Yaitu keinginan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin untuk melayani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan prioritas utama menurunkan angka kemiskinan bagi Fakir Miskin di Kabupaten Merangin, meningkatkan pembinaan bantuan perlindungan dan jaminan sosial melalui pemberian bantuan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), melakukan pembinaan bagi anak terlantar, Panti Asuhan/Jompo, Pembinaan eks penyandang masalah kesejahteraan sosial, penyandang cacat, dan penguatan kapasitas bagi lembaga kesejahteraan sosial (LKS).

Misi Kedua yaitu merupakan keinginan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin untuk Meningkatkan penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak, Meningkatkan persentase kualitas hidup anak dan perempuan melalui terapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Meningkatkan persentase tenaga kerja perempuan dalam pembangunan.

Misi Ketiga yaitu merupakan keinginan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Merangin untuk meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan serta pelayanan organisasi Organisasi Perangkat Daerah.

Tujuan tersebut merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

1) Tujuan Penyelenggaraan Bidang Sosial, antara lain:

1. Meningkatkan ketersediaan akses masyarakat miskin terhadap bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
2. Meningkatkan pelayanan, bantuan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS
3. Meningkatnya pembinaan, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS
4. Meningkatkan usaha kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan orsos, dan lembaga kesejahteraan sosial kemasyarakatan lainnya

2) Tujuan Penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dalam mencapai Kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
2. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam kelembagaan politik dan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja perempuan

3) Tujuan Pelayanan Organisasi, antara lain :

1. Meningkatnya efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Urusan Pemerintah Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 4.1
TUJUAN YANG DITETAPKAN UNTUK MENCAPAI VISI DAN MISI

No	MISI	TUJUAN
1	Mewujudkan pelayanan sosial yang efektif dan efisien terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan ketersediaan akses masyarakat miskin terhadap bantuan pemenuhan kebutuhan dasar2. Meningkatkan pelayanan, bantuan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS3. Meningkatnya pembinaan, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS4. Meningkatkan usaha kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan orsos, dan lembaga kesejahteraan sosial kemasyarakatan

		lainnya
2	Mewujudkan peningkatan kualitas, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mendorong pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dalam mencapai Kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan 2. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam kelembagaan politik dan masyarakat 3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja perempuan
3	Mewujudkan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan urusan Pemerintah Bidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Urusan Pemerintah Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang secara terukur akan dicapai nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran dan bulanan. sasaran harus spesifik, dapat dinilai dan menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode yang telah ditetapkan, adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

1) Sasaran Penyelenggaraan Bidang Sosial, antara lain :

- ❖ Terwujudnya peningkatan penanganan masyarakat miskin di kabupaten merangin
- ❖ Terwujudnya pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan social
- ❖ Terwujudnya pembinaan, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS
- ❖ Terwujudnya peran serta organisasi/ lembaga sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya dalam usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial (PSKS)

2) Sasaran Penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antarlain :

- ❖ Terwujudnya peningkatan implementasi pengarusutamaan gender serta peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
- ❖ Terwujudnya Peningkatan Perempuan dalam legislatif
- ❖ Terwujudnya peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan

3) Sasaran Pelayanan Organisasi antara lain :

- ❖ Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja birokrasi.

Upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka perlu ditetapkan beberapa kebijakan yang terdiri dari:

A. Bidang Sosial

- ❖ Memberikan kemudahan akses memperoleh bantuan dan menyederhanakan persyaratan dalam proses pengajuan bantuan serta fasilitasi akses permodalan.
- ❖ Memberikan pelatihan keterampilan berusaha bagi fakir miskin.
- ❖ Menyiapkan petugas pendampingan dan membantu dalam hal peningkatan produksi dan pasar.

-
- ❖ Mendorong peningkatan kesejahteraan TKSK dalam pendapatan data PMKS dan data Fakir miskin di Kab. Merangin.
 - ❖ Melakukan persiapan stock dan perluasan gudang serta percepatan pemberian bantuan ke korban bencana.
 - ❖ Melakukan upaya pendampingan sosial dengan melibatkan unsur-unsur terkait dan pemerhati sosial lainnya dalam upaya mendorong motivasi, mental dan spiritual warga SAD untuk melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.
 - ❖ Meningkatkan komunikasi sosial yang berkesinambungan untuk mencegah terjadinya konflik sosial.
 - ❖ Meningkatkan pembinaan bagi anak terlantar di luar panti melalui pemberian bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - ❖ Memberikan bantuan kebutuhan dasar ke pada anak-anak dan jompo terlantar dalam panti serta pembinaan bagi komisi lansia daerah.
 - ❖ Meningkatkan penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba di masyarakat, Eks napi dan Eks narkoba.
 - ❖ Melakukan pengiriman orang gila, PSK ke luar daerah untuk di rehabilitasi serta melakukan pemulangan orang terlantar secara estafet.
 - ❖ Menyiapkan pelatihan dan bantuan peralatan kerja, mencari peluang kerja bagi penyandang cacat serta memberikan bantuan nutrisi bagi ODK berat.
 - ❖ Memberikan kemudahan dan akses pembentukan wadah penyelenggaraan kesejahteraan social.
 - ❖ Meningkatkan profesionalitas pekerja sosial masyarakat (PSM) dan lembaga kesejahteraan keluarga (LK3).
 - ❖ Membangun kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 - ❖ Mensosialisasikan Penyelenggaraan kesejahteraan kepada dunia usaha dan masyarakat serta.
 - ❖ Memberikan penghargaan kepada pejuang, pahlawan nasional di Kab. Merangin.

B. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- ❖ Penguatan kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, kegiatan dan pembangunan di segala bidang termasuk penyediaan data dan statistic gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat.
- ❖ Peningkatan kualitas pelayanan dalam penanganan kasus perempuan dan anak.

-
- ❖ Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - ❖ Mewujudkan anak sehat tumbuh dan berkembang secara optimal, cerdas, ceria, berpartisipasi aktif sesuai usianya.
 - ❖ Meningkatkan kemampuan dan pemahaman perempuan dibidang politik melalui peningkatan kapasitas perempuan.
 - ❖ Menyediakan regulasi daerah terkait dengan keterlibatan perempuan dibidang politik dan jabatan public.
 - ❖ Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
 - ❖ Pembinaan organisasi, pemberdayaan perekonomian perempuan dengan memberikan keterampilan berusaha bagi kaum perempuan.
 - ❖ Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumberdaya kaum perempuan.
 - ❖ Penguatan kapasitas perempuan dalam berwirausaha.

C. Bidang Pelayanan Organisasi

- ❖ Menyusun laporan kinerja (LKJ) sesuai kinerja

III.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Perencanaan adalah usaha yg dilakukan secara sadar, terorganisir, dan terus menerus guna memilih alternatif yg terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu (*Waterston*). Untuk itu dalam konsep pembangunan makro, proses perencanaan merupakan hal yang sangat penting dan strategis yang harus dilakukan, agar implementasi penyelenggarannya dapat dilakukan secara efisien, efektif dan tepat sasaran, serta mempertimbangkan dari segi kebutuhan, manfaat dan keuntungan yang bisa peroleh dari wujud pembangunan tersebut, yang pada akhirnya akan dirasakan dampaknya secara luas oleh masyarakat secara menyeluruh. Dalam perencanaan bidang sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, tetap mengarah pada pencapaian Visi-Misi Berbenah Menuju Merangin Emas 2014-2018 melalui kebijakan strategis yang diperlukan sebagai proses awal terwujudnya pencapaian visi dan misi organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Berbagai potensi dan permasalahan yang mengemuka pada bab terdahulu, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin untuk menyusun kerangka perencanaan pembangunan yang lebih fokus dan terarah, dalam upaya meminimalisir perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat. Oleh karenanya, konsep perencanaan yang akan dibangun harus didasari dengan kondisi permasalahan yang terjadi, relevansi hubungan perencanaan dengan implementasinya, strategi penanganannya dan evaluasi pelaksanaan program yang telah dan akan dijalankan ke depan.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, sebagai salah satu SKPD yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan 2 (dua) urusan, yaitu 1 (satu) urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial dan dua (2) urusan wajib non pelayanan dasar bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah menyusun tahapan-tahapan implementasi perencanaan melalui program dan kegiatan sebagai bentuk dukungan tujuan, sasaran dalam Visi dan Misi organisasi.

Oleh karenanya sebagai indikasi terlaksananya program/kegiatan yang akan dilaksanakan selama rentang waktu 5 tahun ke depan, maka tahapan-tahapan dalam menyusun perencanaan program dimulai dari menentukan tujuan dan sasaran, strategi, indikator keberhasilan, kelompok sasaran dan pagu indikatif yang dibutuhkan. Adapun Program-program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin

Kabupaten Merangin selama periode Renstra 2014-2018, adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM UTAMA

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, kinerja yang ingin dicapai adalah persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasarnya.

2. PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, kinerja yang ingin dicapai adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan bantuan sosial dalam pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar

3. PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR

Program Pembinaan Anak Terlantar, kinerja yang ingin dicapai adalah Pembinaan bagi anak – anak terlantar

4. PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo, kinerja yang ingin dicapai adalah Panti Asuhan/Jompo yang dilakukan pembinaan termasuk bantuan untuk anak dan jompo terlantar dalam panti.

5. PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL

Program pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial, kinerja yang ingin dicapai adalah Pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya Narkoba, serta pembinaan dan pelayanan terhadap Permasalahan Penyakit Sosial.

6. PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA

Program Para Penyandang Cacat dan Trauma, kinerja yang ingin dicapai adalah para penyandang cacat yang dilakukan pembinaan.

7. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, kinerja yang ingin dicapai adalah lembaga kesejahteraan sosial yang dibina untuk diberdayakan serta membantu pemerintah dalam menangani masalah sosial.

8. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK

Program kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, kinerja yang ingin dicapai adalah menurunkan Persentase tenaga kerja dibawah umur yang dikerjakan sehingga anak dapat mendapatkan hak dan kewajibannya

9. PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, kinerja yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas hidup anak dan perempuan melalui terapan ilmu pengetahuan dan teknologi

10. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, kinerja yang ingin dicapai adalah meningkatnya persentase Tenaga Kerja Perempuan dalam Pembangunan

B. PROGRAM PENUNJANG

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kinerja yang ingin dicapai adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kinerja yang ingin dicapai adalah Penyediaan dan Pemeliharaan Fasilitas Kerja Aparatur.

3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Program Peningkatan Disiplin Aparatur, kinerja yang ingin dicapai adalah Meningkatnya disiplin Aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.

4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, kinerja yang ingin dicapai adalah Peningkatan Kompetensi Pegawai dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.

5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, kinerja yang ingin dicapai adalah tersusunnya laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.

6. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan kinerja yang ingin dicapai adalah Peningkatan e-planing integritas sistem perencanaan yang berkualitas

7. PROGRAM VISUALISASI HASIL PEMBANGUNAN

Program Visualisasi Hasil Pembangunan Kinerja yang ingin dicapai adalah penyelenggaraan dan mengikuti expo yang berkualitas dalam pelayanan pemerintahan dan pembangunan

8. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kinerja yang ingin dicapai adalah pengendalian Sistem Intern Pemerintah yang berkualitas dalam penyelenggaraan kegiatan dan pembangunan

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

IV.1 Indikator Kinerja

Adapun indikator kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada RPJMD Perubahan Kabupaten Merangin tahun 2014 - 2018 adalah sebagai berikut :

a. Bidang Sosial

1. Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasarnya
2. Jumlah PMKS penerima bantuan sosial
3. Jumlah Anak Terlantar yang dibina
4. Jumlah Panti Asuhan/Panti Jompo yang dibina
5. Jumlah Pembinaan dilakukan
6. Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma yang dibina
7. Jumlah Lembaga kesejahteraan Sosial (LKS) yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS

b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Jumlah Jejering Kelembagaan Perempuan dan Anak
2. Indeks Pembangunan Gender
3. Persentase Tenaga Kerja Perempuan dibidang Formal

IV.2 Kelompok Sasaran

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2014 – 2018 :

1) Sasaran Penyelenggaraan Bidang Sosial, antara lain :

- ❖ **Terwujudnya peningkatan penanganan masyarakat miskin di kabupaten merangin, dengan indicator kinerja :**

-
- ❖ Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasarnya, dimana target pada tahun 2017 sebesar 6%

 - ❖ **Terwujudnya pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan social, dengan indicator kinerja :**
 - ❖ Jumlah PMKS penerima bantuan sosial, dimana target pada tahun 2017 sebesar 686 orang

 - ❖ **Terwujudnya pembinaan, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS, dengan indicator kinerja :**
 - ❖ Jumlah anak terlantar yang dibina, dimana target pada tahun 2017 sebesar 87 Anak
 - ❖ Jumlah panti asuhan/Panti jompo yang dibina, dimana target pada tahun 2017 sebesar 17 Panti
 - ❖ Jumlah pembinaan dilakukan, dimana target pada tahun 2017 sebesar 1 Kali/Tahun
 - ❖ Jumlah Penyandang cacat dan trauma yang dibina, dimana target pada tahun 2017 sebesar 135 Anak

 - ❖ **Terwujudnya peran serta organisasi/ lembaga sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya dalam usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial (PSKS), dengan indicator kinerja :**
 - ❖ Jumlah lembaga kesejahteraan sosial (LKS) yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS, dimana target pada tahun 2017 sebesar 36 LKS

2) Sasaran Penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antaralain :

❖ **Terwujudnya peningkatan implementasi pengarusutamaan gender serta peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, dengan indicator kinerja :**

❖ Jumlah Jejering Kelembagaan Perempuan dan Anak, dimana pada tahun 2017 sebesar 23 Organisasi

❖ **Terwujudnya Peningkatan Perempuan dalam legislatif, dengan indicator kinerja :**

❖ Indeks Pembangunan Gender, dimana target pada tahun 2017 sebesar 87,47%

❖ **Terwujudnya peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan, dengan indicator kinerja :**

❖ Persentase Tenaga Kerja Perempuan dibidang Formal, dimana target pada tahun 2017 sebesar 10%

3) Sasaran Pelayanan Organisasi antara lain :

❖ Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja birokrasi.

IV.3 Lokasi Kegiatan, Kebutuhan Dana Indikatif, Sumber Dana

Secara rinci lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif serta sumber dana kegiatan pada tahun 2017 tampak pada tabel IV.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas daerah Tahun 2017 Kabupaten Merangin sebagaimana terlampir

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para Pelaku-Pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya Merembes Kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output **Rencana Kerja** Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah **Program Tahunan** Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017, Rencana Kerja (RENJA) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin. Rencana Kerja (RENJA) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

DATA USULAN RENJA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2017

- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Awal : Rp.7,078,785,000.00

- **Pagu Melebihi Batas Anggaran yang ditentukan Rp.0.00**

- Pagu Terpakai (DAU & DAK) Rp.7,078,785,000.00

- Pagu Kegiatan -

- DAU Rp.7,078,785,000.00

- DAK Rp.0.00

- APBD Prov Rp.2,050,000,000.00

- APBN Rp.4,600,000,000.00

- Pagu Sub_Kegiatan -

- DAU Rp.0.00

- DAK Rp.0.00

APBD Prov Rp.0.00

- APBN Rp.0.00

No Rek	Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kerja									Pagu Indikatif				Keterangan			Sumber Dana
					Hasil Program			Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan			DAU	DAK	APBD PROV.	APBN	Urusan	SKPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target									
						Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan								
XX.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berkualitas	Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan										1,273,000,000.00	0.00	0.00	0.00					
XX.XX.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat				Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	94	%	Jumlah Dokumen, surat yang terselesaikan	1500	Surat	Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	94	%	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
XX.XX.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	94	%	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12	bulan	Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	94	%	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
XX.XX.01.03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	94	%	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terlunasi Pajaknya	14	unit	Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	94	%	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,

XX.XX.01.04	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	94	%	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	14	Orang	Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	94	%	85,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
XX.XX.01.05	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	94	%	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12	bulan	Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	94	%	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
XX.XX.01.09	Penyediaan alat tulis kantor				Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	94	%	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	bulan	Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	94	%	42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
XX.XX.01.10	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	94	%	Jumlah jenis barang Cetakan dan Penggandaan	12	Jenis	Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	94	%	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
XX.XX.01.11	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	94	%	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang diadakan	10	Jenis	Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	94	%	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
XX.XX.01.12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	94	%	Jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang diadakan	15	Media Massa	Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	94	%	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
XX.XX.01.13	Penyediaan makanan dan minuman				Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	94	%	Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai/ Pasien/ Tamu	11	bulan	Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	94	%	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
XX.XX.01.14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	94	%	Frekwensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	80	Kali	Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	94	%	350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
XX.XX.01.06	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran				Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	94	%	Tersedianya jasa administrasi dan teknis perkantoran	60	Orang	Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	94	%	475,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,

XX.XX.01.15	Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah				Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	94	%	Frekuensi koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah yang dilaksanakan	80	Kali	Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	94	%	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
XX.XX.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berkualitas	Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan											742,785,000.00	0.00	0.00	0.00				
XX.XX.02.01	Pembangunan gedung kantor				Rata-Rata Persentase Sarana dan Prasaran Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	84	%	Jumlah unit gedung kantor yang dibangun	2	Unit	Rata-Rata Persentase Sarana dan Prasaran Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	84	%	380,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
XX.XX.02.05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional				Rata-Rata Persentase Sarana dan Prasaran Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	84	%	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	2	Unit	Rata-Rata Persentase Sarana dan Prasaran Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	84	%	0.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
XX.XX.02.07	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas				Rata-Rata Persentase Sarana dan Prasaran Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	84	%	Jumlah unit perlengkapan rumah jabatan/dinas yang sediakan	0	Unit	Rata-Rata Persentase Sarana dan Prasaran Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	84	%	0.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
XX.XX.02.06	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				Rata-Rata Persentase Sarana dan Prasaran Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	84	%	Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	2	paket	Rata-Rata Persentase Sarana dan Prasaran Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	84	%	17,785,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
XX.XX.02.24	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas				Rata-Rata Persentase Sarana dan Prasaran Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	84	%	Jumlah unit peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia	0	Unit	Rata-Rata Persentase Sarana dan Prasaran Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	84	%	0.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
XX.XX.02.08	Pengadaan peralatan gedung kantor				Rata-Rata Persentase Sarana dan Prasaran Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	84	%	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diadakan	4	Unit	Rata-Rata Persentase Sarana dan Prasaran Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	84	%	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,

XX.XX.02.11	Pengadaan mebeleur				Rata-Rata Persentase Sarana dan Prasaran Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	84	%	Jumlah Meubeler yang diadakan	15	Unit	Rata-Rata Persentase Sarana dan Prasaran Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	84	%	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
XX.XX.02.12	Pengadaan komputer				Rata-Rata Persentase Sarana dan Prasaran Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	84	%	Jumlah perangkat komputer yang disediakan	10	Unit	Rata-Rata Persentase Sarana dan Prasaran Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	84	%	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
XX.XX.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas				Rata-Rata Persentase Sarana dan Prasaran Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	84	%	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	1	Unit	Rata-Rata Persentase Sarana dan Prasaran Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	84	%	0.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
XX.XX.02.14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Rata-Rata Persentase Sarana dan Prasaran Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	84	%	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	Unit	Rata-Rata Persentase Sarana dan Prasaran Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	84	%	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
XX.XX.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Rata-Rata Persentase Sarana dan Prasaran Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	84	%	Jumlah kendaraan dinas roda 4 (empat) yang dipelihara	6	Unit	Rata-Rata Persentase Sarana dan Prasaran Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	84	%	85,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
XX.XX.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				Rata-Rata Persentase Sarana dan Prasaran Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	84	%	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	24	Unit	Rata-Rata Persentase Sarana dan Prasaran Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	84	%	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
XX.XX.02.13	Pengadaan alat studio dan komunikasi				Rata-Rata Persentase Sarana dan Prasaran Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	84	%	Jumlah Alat Studio dan Komunikasi yang disediakan	0	Unit	Rata-Rata Persentase Sarana dan Prasaran Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	84	%	0.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
XX.XX.02.28	Sistem informasi pengelola keuangan SKPD				Rata-Rata Persentase Sarana dan Prasaran Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	84	%	Meningkatkan kelancaran mobilitas kerja	0	Tahun	Rata-Rata Persentase Sarana dan Prasaran Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	84	%	0.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		

XX.XX.02.18	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor				Rata-Rata Persentase Sarana dan Prasaran Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	84	%	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor yang direhab	0	Unit	Rata-Rata Persentase Sarana dan Prasaran Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	84	%	0.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
XX.XX.02.34	Pemeliharaan berkala TMP Bangko				Rata-Rata Persentase Sarana dan Prasaran Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	84	%	jumlah TMP yang terpelihara	3	unit	Rata-Rata Persentase Sarana dan Prasaran Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	84	%	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
XX.XX.02.17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Rata-Rata Persentase Sarana dan Prasaran Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	84	%	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	1	Unit	Rata-Rata Persentase Sarana dan Prasaran Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	84	%	0.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
XX.XX.05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berkualitas	Penataan organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan											90,000,000.00	0.00	0.00	0.00				
XX.XX.05.01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Rata-Rata Persentase Sarana dan Prasaran Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	84	%	Jumlah Pakaian dinas dan atributnya yang disediakan	80	stel	Rata-Rata Persentase Sarana dan Prasaran Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	84	%	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
XX.XX.05.02	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu				Rata-Rata Persentase Sarana dan Prasaran Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	84	%	Jumlah Pakaian olahraga yang disediakan	80	stel	Rata-Rata Persentase Sarana dan Prasaran Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan	84	%	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
04.06.09	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berkualitas	Penataan dan implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis e-planning, e-budget, dan e-audit											0.00	0.00	0.00	0.00				
04.06.09.01	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah				Opini BPK	WDP	Laporan Pelaksanaan SPIP	1	Dokumen	Opini BPK	WDP			0.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		

XX.XX.03	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berkualitas	Penataan dan implementasi sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis e-planning, e-budget, dan e-audit											114,000,000.00	0.00	0.00	0.00				
XX.XX.03.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Nilai SAKIP	CC	Jumlah LAKIP SKPD yang disusun	1	Dokumen	Nilai SAKIP	CC			40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
XX.XX.03.05	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				Nilai SAKIP	CC	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	1	Dokumen	Nilai SAKIP	CC			12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
XX.XX.03.02	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Nilai SAKIP	CC	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1	Dokumen	Nilai SAKIP	CC			20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
XX.XX.03.04	Penyusunan Laporan Tahunan				Nilai SAKIP	CC	Jumlah laporan tahunan yang disusun	1	Dokumen	Nilai SAKIP	CC			15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
XX.XX.03.03	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD				Nilai SAKIP	CC	Jumlah Dokumen Laporan Aset SKPD yang disusun	1	Dokumen	Nilai SAKIP	CC			27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
XX.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berkualitas	Peningkatan sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN dan berkinerja baik											65,000,000.00	0.00	0.00	0.00				
XX.XX.06.02	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan				Persentase Tingkat Keselarasan RKPd terhadap RPJMD	%	Jumlah dokumen Rencana Kerja Tahunan yang disusun	1	Dokumen	Persentase Tingkat Keselarasan RKPd terhadap RPJMD	%			20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
XX.XX.06.03	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran				Persentase Tingkat Keselarasan RKPd terhadap RPJMD	%	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran yang disusun	2	Dokumen	Persentase Tingkat Keselarasan RKPd terhadap RPJMD	%			35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
XX.XX.06.04	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah				Persentase Tingkat Keselarasan RKPd terhadap RPJMD	%	Frekuensi Penyusunan rencana kebutuhan barang dan pemeliharaan barang milik daerah	1	kegiatan	Persentase Tingkat Keselarasan RKPd terhadap RPJMD	%			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,

XX.XX.07	Program Visualisasi Hasil Pembangunan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berkualitas	Peningkatan sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN dan berkinerja baik											50,000,000.00	0.00	0.00	0.00				
XX.XX.07.01	Penyebarluasan Informasi Hasil Pembangunan				Jumlah Penyelenggaraan Pameran yang diikuti	4	kali	Penyelenggaraan pameran publikasi pembangunan	1	Kali	Jumlah Penyelenggaraan Pameran yang diikuti	4	kali	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
XX.XX.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah melalui rekrutmen yang baik dan peningkatan kesejahteraan	Peningkatan sistem perekrutan CPNS dan pegawai kontrak/ honorer yang bebas KKN dan memberikan perhatian khusus untuk putra-putri Merangin											50,000,000.00	0.00	0.00	0.00				
XX.XX.04.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				Persentase Pegawai Yang Mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis	36	%	Jumlah PNS yang mengikuti Bintek Tekhnis (BIMTEK)	11	Orang	Persentase Pegawai Yang Mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis	36	%	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
01.06.03	Program Pelayanan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan sumber daya manusia yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas	Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak											1,045,000,000.00	0.00	500,000,000.00	2,250,000,000.00				
01.06.03.01	Penangan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa				Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial	686	Orang	Jumlah Korban Bencana Alam yang Memperoleh Bantuan Logistik Pada Kondisi pasca Bencana	500	Orang	Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial	686	Orang	200,000,000.00	0.00	300,000,000.00	500,000,000.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU, APBD Prov, APBN.
01.06.03.04	Pembinaan Satuan Penanggulangan Bencana Daerah (TAGANA)				Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial	686	Orang	Satuan penanggulangan bencana daerah (TAGANA) yang dilakukan pembinaan	55	Orang	Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial	686	Orang	110,000,000.00	0.00	0.00	600,000,000.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU, APBN.
01.06.03.05	Pembinaan Suku Anak Dalam				Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial	686	Orang	terlaksananya pembinaan suku anak dalam	12	bulan	Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial	686	Orang	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
01.06.03.06	Pengadaan Tanah Suku Anak Dalam				Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial	686	Orang	Tersedianya tempat tinggal suku anak dalam	3	Hektar	Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial	686	Orang	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
01.06.03.07	Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial				Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial	686	Orang	Terlaksananya pembinaan suku anak dalam	0	kk	Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial	686	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		

01.06.03.08	Pembinaan Usaha Ekonomi produktif bagi warga SAD				Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial	686	Orang	Terlaksananya usaha pembinaan ekonomi warga SAD	200	jiwa	Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial	686	Orang	50,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DAU, APBN.
01.06.03.10	Kordinasi Perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan				Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial	686	Orang	Terlaksananya upaya upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Merangin	12	bulan	Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial	686	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
01.06.03.11	Penyuluhan sosial daerah rawan bencana				Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial	686	Orang	Terlaksananya penyuluhan daerah rawan bencana	12	Kecamatan	Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial	686	Orang	45,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DAU, APBD Prov,
01.06.03.12	Peningkatan Kualitas Pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS				Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial	686	Orang	Jumlah warga SAD yang mendapat bantuan sosial	297	kk	Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial	686	Orang	120,000,000.00	0.00	0.00	650,000,000.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DAU, APBN.
01.06.03.19	Bantuan Barang Masjid, Ponren dan Musholla				Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial	686	Orang	Jumlah Penerima Bantuan Sosial	60	Masjid/Pontren/Musholla	Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial	686	Orang	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DAU,
01.06.04	Program Pembinaan Anak Terlantar	Meningkatkan sumber daya manusia yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas	Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak											50,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00			
01.06.04.02	Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Anak Tidak Mampu				Jumlah anak terlantar yang dibina	87	anak	Jumlah anak terlantar diluar panti yang dibina dan dibantu	80	Anak	Jumlah anak terlantar yang dibina	87	anak	50,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DAU, APBD Prov,
01.06.05	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Meningkatkan sumber daya manusia yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas	Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak											100,000,000.00	0.00	300,000,000.00	1,250,000,000.00			
01.06.05.01	Pelayanan lansia luar panti				Jumlah panti asuhan/panti jompo yang dibina	17	panti	Jumlah lansia terlantar diluar panti yang memperoleh bantuan sosial	26	Orang	Jumlah panti asuhan/panti jompo yang dibina	17	panti	50,000,000.00	0.00	0.00	250,000,000.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DAU, APBN.
01.06.05.03	Pembinaan dan bantuan bagi Panti				Jumlah panti asuhan/panti jompo yang dibina	17	panti	Jumlah panti anak dan panti jompo pembinaan dan bantuan	45	panti	Jumlah panti asuhan/panti jompo yang dibina	17	panti	50,000,000.00	0.00	300,000,000.00	1,000,000,000.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DAU, APBD Prov, APBN.

01.06.06	Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial	Meningkatkan sumber daya manusia yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas	Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak											170,000,000.00	0.00	300,000,000.00	0.00				
01.06.06.01	Sosialisasi dan penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba				Jumlah pembinaan yang dilakukan	1	Kali/Tahun	Jumlah Peserta Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba (Mantan Pengguna Narkoba)	150	Orang	Jumlah pembinaan yang dilakukan	1	Kali/Tahun	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
01.06.06.02	Fasilitasi dan Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial (Orang Gila, Gepeng, PSK dan Penyandang Cacat)				Jumlah pembinaan yang dilakukan	1	Kali/Tahun	Jumlah penyandang penyakit sosial yang memperoleh bantuan dan pelayanan sosial	100	Orang	Jumlah pembinaan yang dilakukan	1	Kali/Tahun	120,000,000.00	0.00	300,000,000.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU, APBD Prov,
01.06.06.04	Pembanguna pusat bimbingan/ konseling bagi eks penyandang penyakit sosial				Jumlah pembinaan yang dilakukan	1	Kali/Tahun	Tersedianya gedung pusat bimbingan konseling	1	Unit	Jumlah pembinaan yang dilakukan	1	Kali/Tahun	0.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
01.06.07	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Meningkatkan sumber daya manusia yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas	Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak											1,217,000,000.00	0.00	700,000,000.00	1,100,000,000.00				
01.06.07.01	Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas pendamping sosial, pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya				Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	6	%	Meningkatnya Pelayanan Petugas TKSK dan Pendamping Dalam Pendataan PMKS	24	Orang	Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	6	%	225,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU, APBD Prov,
01.06.07.02	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin				Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	6	%	Jumlah Fakir Miskin yang mendapat bantuan usaha ekonomi produktif (UEP)	53	Orang	Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	6	%	250,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU, APBN.
01.06.07.03	Penyuluhan sosial dan pemantapan KUBE fakir miskin				Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	6	%	Jumlah Fakir Miskin yang Menerima KUBE (Kelompok usaha bersama) dan pembinaan	80	Orang	Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	6	%	200,000,000.00	0.00	600,000,000.00	600,000,000.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU, APBD Prov, APBN.
01.06.07.06	Pendataan PKH, Keluarga Miskin dan Pelaksanaan Jambore PKH				Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	6	%	terselenggaranya pendataan penyaluran bantuan PKH untuk warga miskin dan jambore Nasional	12	Bulan	Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	6	%	225,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,

01.06.07.07	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin				Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	6	%	Jumlah Fakir Miskin yang Mendapatkan Pelatihan	20	Orang	Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	6	%	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
01.06.07.08	Fasilitasi Manajemen Usaha bagi keluarga miskin				Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	6	%	Jumlah aparaturnya desa yang diberikan pelatihan tentang pemberantasan kemiskinan	50	Orang	Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	6	%	0.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
01.06.07.09	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial				Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	6	%	Jumlah PMKS yang mengikuti pelatihan keterampilan	0	Orang	Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	6	%	0.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
01.06.07.10	Sosialisasi program keluarga harapan				Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	6	%	Jumlah peserta sosialisasi program keluarga harapan	220	Orang	Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	6	%	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
01.06.07.13	Monitoring Distribusi Beras Rakyat (RASTA)				Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	6	%	Terlaksananya peyaluran RASTA yang tepat sasaran	12	Bulan	Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	6	%	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
01.06.07.14	Peningkatan Kapasitas Kinerja Suku Anak Dalam				Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	6	%	Meningkatnya Partisipasi Pelayanan Suku Anak Dalam (SAD)	26	Orang	Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	6	%	117,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
01.06.01	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Meningkatkan sumber daya manusia yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas	Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak											1,065,000,000.00	0.00	0.00	0.00				
01.06.01.05	Fasilitasi dan pembinaan karang taruna				Jumlah LKS yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS	36	LKS	jumlah Karang taruna yang memperoleh pembinaan	215	Karang Taruna	Jumlah LKS yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS	36	LKS	560,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
01.06.01.04	Peringatan hari hari besar nasional dan pemeliharaan taman makan pahlawan				Jumlah LKS yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS	36	LKS	Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional dan pemeliharaan TMP	3	bulan	Jumlah LKS yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS	36	LKS	0.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		

01.06.01.01	Koordinasi dan penyelenggaraan KOMDA lansia				Jumlah LKS yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS	36	LKS	Jumlah lansia yang diberikan pembinaan dan bantuan	25	Orang	Jumlah LKS yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS	36	LKS	220,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
01.06.01.02	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat				Jumlah LKS yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS	36	LKS	Jumlah pelatihan yang diadakan	0	Kali	Jumlah LKS yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS	36	LKS	0.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
01.06.01.03	Peningkatan jenjang kerjasama pelaku pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat				Jumlah LKS yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS	36	LKS	Terlaksananya pembinaan dan peningkatan kerjasama antar LKS	0	bulan	Jumlah LKS yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS	36	LKS	0.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
01.06.01.07	Pelatihan Keterampilan Usaha Kesejahteraan Sosial Kejuruan LAS				Jumlah LKS yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS	36	LKS	jumlah peserta pelatihan sub kejuruan las	20	Orang	Jumlah LKS yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS	36	LKS	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
01.06.01.08	Pelatihan Keterampilan Usaha Kesejahteraan Sosial Kejuruan Menjahit				Jumlah LKS yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS	36	LKS	jumlah peserta pelatihan sub kejuruan Menjahit	20	Orang	Jumlah LKS yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS	36	LKS	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
01.06.01.09	Pelatihan Keterampilan Usaha Kesejahteraan Sosial Kejuruan Bengkel Motor				Jumlah LKS yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS	36	LKS	jumlah peserta pelatihan sub kejuruan bengkel motor	20	Orang	Jumlah LKS yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS	36	LKS	0.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
01.06.01.09	Pelatihan Keterampilan Usaha Kesejahteraan Sosial Kejuruan Bengkel Motor				Jumlah LKS yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS	36	LKS	jumlah peserta pelatihan sub kejuruan bengkel motor	20	Orang	Jumlah LKS yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS	36	LKS	0.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
01.06.01.12	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Bagi Perintis Kemerdekaan/Pahlawan Nasional, Veteran, dan Keluarganya				Jumlah LKS yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS	36	LKS	Terfasilitasinya Kesejahteraan Bagi Veteran dan Keluarganya	10	Veteran	Jumlah LKS yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS	36	LKS	85,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,

01.06.02	Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Meningkatkan sumber daya manusia yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas	Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak											50,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00				
01.06.02.02	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan ex trauma				Jumlah penyandang cacat dan trauma yang dibina	135	anak	Jumlah penyandang cacat yang mendapatkan pelatihan ketrampilan dan praktek belajar berkerja	35	Orang	Jumlah penyandang cacat dan trauma yang dibina	135	anak	50,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU, APBD Prov,
02.02.04	Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Meningkatkan sumber daya manusia yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas	Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak											408,200,000.00	0.00	0.00	0.00				
02.02.04.01	Advokasi dan fasilitas PUG bagi perempuan				Jumlah Jejaring Kelembagaan Perempuan dan Anak	23	Organisasi	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	35	Orang	Jumlah Jejaring Kelembagaan Perempuan dan Anak	23	Organisasi	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
02.02.04.02	Fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A)				Jumlah Jejaring Kelembagaan Perempuan dan Anak	23	Organisasi	Jumlah tenaga P2TP2A yang memadai dan kualitas pelayanan penanganan kasus perempuan dan anak	74	Orang	Jumlah Jejaring Kelembagaan Perempuan dan Anak	23	Organisasi	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
02.02.04.04	Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan				Jumlah Jejaring Kelembagaan Perempuan dan Anak	23	Organisasi		50		Jumlah Jejaring Kelembagaan Perempuan dan Anak	23	Organisasi	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
02.02.04.05	Pembentukan forum anak daerah				Jumlah Jejaring Kelembagaan Perempuan dan Anak	23	Organisasi	Terselenggaranya peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan anak	12	Orang	Jumlah Jejaring Kelembagaan Perempuan dan Anak	23	Organisasi	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
02.02.04.06	Pengembangan sistem informasi gender dan anak				Jumlah Jejaring Kelembagaan Perempuan dan Anak	23	Organisasi	terdapatnya data terpilah perempuan dan anak	1	Dokumen	Jumlah Jejaring Kelembagaan Perempuan dan Anak	23	Organisasi	35,200,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
02.02.04.07	Monitoring dan evaluasi pelaporan				Jumlah Jejaring Kelembagaan Perempuan dan Anak	23	Organisasi	tersedianya laporan Monev	1	dokumen	Jumlah Jejaring Kelembagaan Perempuan dan Anak	23	Organisasi	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
02.02.04.08	Pengembangan Kota Layak Anak				Jumlah Jejaring Kelembagaan Perempuan dan Anak	23	Organisasi	terselenggaranya pembangunan responsip anak	12	Bulan	Jumlah Jejaring Kelembagaan Perempuan dan Anak	23	Organisasi	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,

02.02.02	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Meningkatkan prestasi pemuda dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah	peningkatan kesetaraan gender yang proporsional dalam pembangunan daerah yang berorientasi pada profesionalisme											188,800,000.00	0.00	0.00	0.00				
02.02.02.02	Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak				Indeks Pembangunan Gender	87.47	%	jumlah peserta sosialisasi	100	Orang	Indeks Pembangunan Gender	87.47	%	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
02.02.02.01	Perumusan dan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang politik dan jabatan publik				Indeks Pembangunan Gender	87.47	%	Regulasi Daerah tentang peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang politik dan jabatan publik	35	Perbup/Perda	Indeks Pembangunan Gender	87.47	%	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
02.02.02.03	Sosialisasi perlindungan Anak				Indeks Pembangunan Gender	87.47	%	Frekwensi sosialisasi perlindungan anak	10	Kali	Indeks Pembangunan Gender	87.47	%	118,800,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
02.02.01	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatkan prestasi pemuda dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah	peningkatan kesetaraan gender yang proporsional dalam pembangunan daerah yang berorientasi pada profesionalisme											400,000,000.00	0.00	0.00	0.00				
02.02.01.03	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan				Persentase Tenaga Kerja Perempuan Perempu-an dibidang Formal	10	%	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuan	25	Organisasi	Persentase Tenaga Kerja Perempuan Perempu-an dibidang Formal	10	%	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
02.02.01.05	Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera				Persentase Tenaga Kerja Perempuan Perempu-an dibidang Formal	10	%	Terselenggaranya Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	3	Kecamatan	Persentase Tenaga Kerja Perempuan Perempu-an dibidang Formal	10	%	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
02.02.01.08	Visualisasi hasil karya perempuan				Persentase Tenaga Kerja Perempuan Perempu-an dibidang Formal	10	%	Frekwensi visualisasi hasil karya perempuan	1	Kali	Persentase Tenaga Kerja Perempuan Perempu-an dibidang Formal	10	%	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,
02.02.01.10	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Perempuan (Pelatihan Membatik)				Persentase Tenaga Kerja Perempuan Perempu-an dibidang Formal	10	%	jumlah peserta perempuan yang mengikuti pendidikan	20	Orang	Persentase Tenaga Kerja Perempuan Perempu-an dibidang Formal	10	%	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		DAU,

02.02.01.11	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Perempuan (Pelatihan Tata boga)				Persentase Tenaga Kerja Perempuan dibidang Formal	10	%	jumlah peserta perempuan yang mengikuti pendidikan	20	Orang	Persentase Tenaga Kerja Perempuan dibidang Formal	10	%	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DAU,
02.02.01.12	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Perempuan (Pelatihan Menjahit)				Persentase Tenaga Kerja Perempuan dibidang Formal	10	%	jumlah peserta perempuan yang mengikuti pendidikan	20	Orang	Persentase Tenaga Kerja Perempuan dibidang Formal	10	%	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	URUSAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DAU,

Bangka, Januari 2017

Kepala Dinas

Dr. ARISLAN, M.Pd

Pembina TK. I

NIP. 19590605 198611 1 001

**RENCANA KERJA (RENJA) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017**

SKPD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MERANGIN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	RENCANA
1	2	3	4		5	6
A	PROGRAM/KEGIATAN PADA SETIAP SKPD					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input	Jumlah Dana	Rp	4,000,000
Output			Jumlah Dokumen surat yang terselesaikan	Tahun	1	
Outcome			Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	94	
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input	Jumlah Dana	Rp	70,000,000
Output			Jumlah Jasa Sumber daya Air dan Listrik yang dibayar	Bulan	12	
Outcome			Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	94	
		3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input	Jumlah Dana	Rp	15,000,000
Output			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terlunasi pajaknya	Unit	14	
Outcome			Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	94	
		4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input	Jumlah Dana	Rp	85,000,000
Output			Jumlah Tenaga Administrtasi Keuangan yang disediakan	Orang	14	
Outcome			Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	94	
		5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input	Jumlah Dana	Rp	17,000,000
Output			Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan	Bulan	12	
Outcome			Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	94	
		6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input	Jumlah Dana	Rp	42,000,000
Output			Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	Bulan	12	
Outcome			Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	94	
		7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input	Jumlah Dana	Rp	35,000,000
Output			Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	12	
Outcome			Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	94	
		8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input	Jumlah Dana	Rp	45,000,000
Output			Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik yang diadakan	Jenis	10	
Outcome			Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	94	
		9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Input	Jumlah Dana	Rp	30,000,000
Output			Jumlah langganan media massa yang disediakan	Media Masa	15	
Outcome			Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	94	
	10 Penyediaan Makanan dan Minuman	Input	Jumlah Dana	Rp	55,000,000	
Output		Jumlah makanan dan minuman harian pegawai yang disediakan	Bulan	11		
Outcome		Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	94		
	11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Input	Jumlah Dana	Rp	350,000,000	
Output		Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan	Kali	80		
Outcome		Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	94		
	12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis	Input	Jumlah Dana	Rp	475,000,000	
Output		Jumlah Tenaga Harian Lepas/Honorer yang disediakan	Orang	60		
Outcome		Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	94		
	13 Koordinasi Dalam Daerah (Kecamatan)	Input	Jumlah Dana	Rp	50,000,000	
Output		Frekuensi koordinasi, konsultasi dan kunjungan ke dalam Daerah yang dilaksanakan	Kali	80		

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Pembangunan Gedung Kantor	Outcome	Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	94		
				Input	Jumlah Dana	Rp	380,000,000		
				Output	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Unit	2		
		2	Pengadaan Kelengkapan Gedung Kantor	2	Pengadaan Kelengkapan Gedung Kantor	Outcome	Rata-rata persentase sarana dan prasarana pendukung kerja Aparatur yang disediakan	%	84
						Input	Jumlah Dana	Rp	17,785,000
						Output	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	Paket	2
		3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Outcome	Rata-rata persentase sarana dan prasarana pendukung kerja Aparatur yang disediakan	%	84
						Input	Jumlah Dana	Rp	20,000,000
						Output	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	Unit	4
		4	Pengadaan Mebeleur	4	Pengadaan Mebeleur	Outcome	Rata-rata persentase sarana dan prasarana pendukung kerja Aparatur yang disediakan	%	84
						Input	Jumlah Dana	Rp	45,000,000
						Output	Jumlah Mebeler yang disediakan	Unit	15
		5	Pengadaan Komputer	5	Pengadaan Komputer	Outcome	Rata-rata persentase sarana dan prasarana pendukung kerja Aparatur yang disediakan	%	84
						Input	Jumlah Dana	Rp	40,000,000
						Output	Jumlah Perangkat Komputer yang disediakan	Unit	10
		6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Outcome	Rata-rata persentase sarana dan prasarana pendukung kerja Aparatur yang disediakan	%	84
						Input	Jumlah Dana	Rp	50,000,000
						Output	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Unit	1
		7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Outcome	Rata-rata persentase sarana dan prasarana pendukung kerja Aparatur yang disediakan	%	84
						Input	Jumlah Dana	Rp	85,000,000
						Output	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Unit	6
		8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Outcome	Rata-rata persentase sarana dan prasarana pendukung kerja Aparatur yang disediakan	%	84
						Input	Jumlah Dana	Rp	15,000,000
						Output	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Unit	24
		9	Pemeliharaan Berkala TMP Bangko	9	Pemeliharaan Berkala TMP Bangko	Outcome	Rata-rata persentase sarana dan prasarana pendukung kerja Aparatur yang disediakan	%	84
						Input	Jumlah Dana	Rp	90,000,000
						Output	Jumlah TMP yang dipelihara	Unit	1

3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Input	Jumlah Dana	Rp	50,000,000
				Output	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	Stel	80
				Outcome	Rata-rata persentase sarana dan prasarana pendukung kerja Aparatur yang disediakan	%	84
		2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Input	Jumlah Dana	Rp	40,000,000
				Output	Jumlah Pakaian Olahraga yang disediakan	Stel	80
				Outcome	Rata-rata persentase sarana dan prasarana pendukung kerja Aparatur yang disediakan	%	84
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input	Jumlah Dana	Rp	40,000,000
				Output	Jumlah LAKIP SKPD yang disusun	Dokumen	1
				Outcome	Nilai SAKIP	-	CC
		2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Input	Jumlah Dana	Rp	12,000,000
				Output	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disusun	Dokumen	1
				Outcome	Nilai SAKIP	-	CC
		3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Input	Jumlah Dana	Rp	20,000,000
				Output	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	Dokumen	1
				Outcome	Nilai SAKIP	-	CC
		4	Penyusunan Laporan Tahunan	Input	Jumlah Dana	Rp	15,000,000
				Output	Jumlah Laporan tahunan yang disusun	Dokumen	1
				Outcome	Nilai SAKIP	-	CC
		5	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD	Input	Jumlah Dana	Rp	27,000,000
				Output	Jumlah Laporan Dokumen Aset SKPD yang disusun	Dokumen	1
				Outcome	Nilai SAKIP	-	CC
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan	1	Penyusunan Rencana Kerja tahunan	Input	Jumlah Dana	Rp	20,000,000
				Output	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan yang disusun	Dokumen	1
				Outcome	Persentase Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	
		2	Penyusunan rencana Kerja dan Anggaran '	Input	Jumlah Dana	Rp	35,000,000
				Output	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun	Dokumen	2
				Outcome	Persentase Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	
		3	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan pemeliharaan Barang Milik	Input	Jumlah Dana	Rp	10,000,000
				Output	Jumlah Dokumen Laporan Aset SKPD yang disusun	Dokumen	1
				Outcome	Persentase Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	
6	Program Visualisasi Hasil Pembangunan	1	Penyebarluasan Infomasi Hasil Pembangunan	Input	Jumlah Dana	Rp	50,000,000
				Output	Jumlah Pameran yang diikuti	kali	1
				Outcome	Jumlah Penyelenggaraan Pameran yang diikuti	Kali	4
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Input	Jumlah Dana	Rp	50,000,000
				Output	Jumlah Pegawai yang mengikuti BIMTEK	Orang	11
				Outcome	Persentase Pegawai yang mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis	%	36

8	Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Input	Jumlah Dana	Rp	200,000,000
				Output	Jumlah korban bencana alam yang memperoleh bantuan logistik pada kondisi pasca bencana	Orang	500
				Outcome	Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial	Orang	686
		2	Pembinaan Satuan Penanggulangan Bencana Daerah (TAGANA)	Input	Jumlah Dana	Rp	110,000,000
				Output	Jumlah Tagana yang memperoleh pembinaan	Orang	55
				Outcome	Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial	Orang	686
		3	Pembinaan Suku Anak Dalam	Input	Jumlah Dana	Rp	120,000,000
				Output	Jumlah Suku Anak Dalam yang memperoleh Pembinaan	Bulan	12
				Outcome	Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial	Orang	686
		4	Pengadaan Tanah Suku Anak Dalam	Input	Jumlah Dana	Rp	200,000,000
				Output	Jumlah SAD yang memperoleh lahan tempat tinggal	Hektar	3
				Outcome	Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial	Orang	686
		5	Pembinaan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Warga SAD	Input	Jumlah Dana	Rp	50,000,000
				Output	Jumlah SAD yang memperoleh pemberdayaan ekonomi sesuai potensi lokal	Jiwa	200
				Outcome	Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial	Orang	686
		6	Penyuluhan Sosial Daerah Rawan Bencana	Input	Jumlah Dana	Rp	45,000,000
				Output	Terlaksananya Penyuluhan Daerah Rawan Bencana	Kecamatan	12
				Outcome	Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial	Orang	686
		7	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Input	Jumlah Dana	Rp	120,000,000
				Output	Jumlah SAD yang memperoleh Pengetahuan dan bantuan untuk mencegah terjadinya rawan pangan	KK	297
				Outcome	Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial	Orang	686
		8	Bantuan Barang Masjid, Pontren dan Musholla	Input	Jumlah Dana	Rp	200,000,000
				Output	Jumlah Penerima Bantuan Sosial	Masjid/Pontren/Musholla	60
				Outcome	Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial	Orang	686
9	Program Pembinaan Anak Terlantar	1	Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Anak Tidak Mampu	Input	Jumlah Dana	Rp	50,000,000
				Output	Jumlah Anak Terlantar diluar Panti yang dibina dan dibantu	Anak	80
				Outcome	Jumlah Anak Terlantar yang dibina	Anak	87
10	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	1	Pelayanan Lansia Luar Panti	Input	Jumlah Dana	Rp	50,000,000
				Output	Jumlah Lansia Terlantar luar panti yang memperoleh bantuan sosial	Orang	26
				Outcome	Jumlah Panti Asuhan/ Panti Jompo yang dibina	Panti	17
		2	Pembinaan dan Bantuan Bagi Panti	Input	Jumlah Dana	Rp	50,000,000
				Output	Jumlah Lansia Terlantar dalam Panti yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar	Panti	45
				Outcome	Jumlah Panti Asuhan/ Panti Jompo yang dibina	Panti	17

11	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	1	Sosialisasi dan penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	Input	Jumlah Dana	Rp	50,000,000
				Output	Jumlah peserta penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba	Orang	150
				Outcome	Jumlah Pembinaan dilakukan	Kali/Tahun	1
		2	Fasilitasi dan Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial (Orang Gila, Gepeng, PSK dan Penyandang Cacat)	Input	Jumlah Dana	Rp	120,000,000
				Output	Jumlah Penyandang Penyakit Sosial yang memperoleh Pelayanan Sosial untuk direhabilitasi dan dikirim ke daerah asal	Orang	100
				Outcome	Jumlah Pembinaan	Kali/Tahun	1
12	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas pendamping Sosial, Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Input	Jumlah Dana	Rp	225,000,000
				Output	Jumlah TKS yang dioptimalkan dalam Pendataan Data Kemiskinan	Orang	25
				Outcome	Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	%	6
		2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	Input	Jumlah Dana	Rp	250,000,000
				Output	Jumlah Fakir Miskin yang Mendapat Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Orang	53
				Outcome	Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	%	6
		3	Penyuluhan Sosial dan Pemantapan KUBE Fakir Miskin	Input	Jumlah Dana	Rp	200,000,000
				Output	Jumlah Fakir Miskin yang menerima bantuan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan Pembinaan	Orang	80
				Outcome	Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	%	6
		4	Pendataan PKH, Keluarga Miskin dan Pelaksanaan Jambore PKH	Input	Jumlah Dana	Rp	225,000,000
				Output	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan PKH	Bulan	12
				Outcome	Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	%	6
		5	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	Input	Jumlah Dana	Rp	50,000,000
				Output	Jumlah Fakir Miskin yang mendapatkan pelatihan	Orang	20
				Outcome	Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	%	6
		6	Sosialisasi Program Keluarga Harapan	Input	Jumlah Dana	Rp	50,000,000
				Output	Jumlah Peserta Sosialisasi PKH	Orang	220
				Outcome	Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	%	6
		7	Monitoring Distribusi Beras Rakyat (RASTRA)	Input	Jumlah Dana	Rp	100,000,000
				Output	Prekuensi beras Rakyat (RASTRA) yang tersalurkan	Bulan	12
				Outcome	Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	%	6
		8	Peningkatan Kapasitas Kinerja Suku Anak Dalam	Input	Jumlah Dana	Rp	117,000,000
				Output	Meningkatnya Partisipasi Pelayanan Suku Anak Dalam (SAD)	Orang	26
				Outcome	Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasar	%	6
13	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1	Fasilitasi dan Pembinaan Karang Taruna	Input	Jumlah Dana	Rp	560,000,000
				Output	Jumlah Karang Taruna yang dibina	Karang Taruna	215
				Outcome	Jumlah LKS yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS	LKS	36

		2	Koordinasi dan Penyelenggaraan KOMDA Lansia	Input	Jumlah Dana	Rp	220,000,000
				Output	Jumlah Lansia yang diberikan Pembinaan dan Bantuan	Orang	25
				Outcome	Jumlah LKS yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS	LKS	36
		3	Pelatihan Keterampilan Usaha Kesejahteraan Sosial kejuruan LAS	Input	Jumlah Dana	Rp	100,000,000
				Output	Jumlah Peserta Pelatihan Sub Kejuruan Las	Orang	20
				Outcome	Jumlah LKS yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS	LKS	36
		4	Pelatihan Keterampilan Usaha Kesejahteraan Sosial Kejuruan Menjahit	Input	Jumlah Dana	Rp	100,000,000
				Output	Jumlah Peserta Pelatihan Sub Kejuruan Menjahit	Orang	20
				Outcome	Jumlah LKS yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS	LKS	36
		5	Kegiatan Fasilitas Peningkatan kesejahteraan Bagi Perintis Kemerdekaan/ Pahlawan Nasional, Veteran,	Input	Jumlah Dana	Rp	85,000,000
				Output	Dokumen RAD MDG's Kabupaten Merangin	Veteran	10
				Outcome	Jumlah LKS yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS	LKS	36
14	Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	1	Pendidikan dan Pelatihan Bai Penyandang Cacat dan Ex Trauma	Input	Jumlah Dana	Rp	50,000,000
				Output	Jumlah Penyandang cacat yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Orang	35
				Outcome	Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma yang dibina	Anak	135
15	Program kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	1	Advokasi dan Fasilitas PUG bagi Perempuan	Input	Jumlah Dana	Rp	40,000,000
				Output	Jumlah perempuan yang mendapatkan peningkatan dalam pembangunan	Orang	35
				Outcome	Jumlah Jejaring Kelembagaan Perempuan dan Anak	Organisasi Perempuan	23
		2	Fasilitas Pengembangan Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Input	Jumlah Dana	Rp	120,000,000
				Output	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani	Orang	74
				Outcome	Jumlah Jejaring Kelembagaan Perempuan dan Anak	Organisasi Perempuan	23
3	Workshop Peningkatan Peran	Input	Jumlah Dana	Rp	50,000,000		

		Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan	Output	Jumlah Perempuan yang mengikuti Workshop	Orang	50	
			Outcome	Jumlah Jejaring Kelembagaan Perempuan dan Anak	Organisasi Perempuan	23	
	4	Pembentukan Forum Anak Daerah	Input	Jumlah Dana	Rp	110,000,000	
			Output	Jumlah peserta Forum Anak Daerah yang dibentuk	Orang	12	
			Outcome	Jumlah Jejaring Kelembagaan Perempuan dan Anak	Organisasi Perempuan	23	
	5	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Input	Jumlah Dana	Rp	35,200,000	
			Output	Jumlah ketersediaan data terpilah Gender	Dokumen	1	
			Outcome	Jumlah Jejaring Kelembagaan Perempuan dan Anak	Organisasi Perempuan	23	
	6	Monitoring dan Evaluasi Pelapor	Input	Jumlah Dana	Rp	18,000,000	
			Output	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	Dokumen	1	
			Outcome	Jumlah Jejaring Kelembagaan Perempuan dan Anak	Organisasi Perempuan	23	
	7	Pengembangan Kota Layak Anak	Input	Jumlah Dana	Rp	35,000,000	
			Output	Jumlah anak yang mendapatkan pembangunan responsif	Bulan	12	
			Outcome	Jumlah Jejaring Kelembagaan Perempuan dan Anak	Organisasi Perempuan	23	
16	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1	Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan	Input	Jumlah Dana	Rp	30,000,000
				Output	Jumlah Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan	Orang	100
				Outcome	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	87.47
		2	Perumusan dan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang politik dan jabatan publik	Input	Jumlah Dana	Rp	40,000,000
				Output	Jumlah regulasi daerah tentang peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang politik dan jabatan publik	Perbup/ Perda	35
				Outcome	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	87.47

17	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	3	Sosialisasi Perlindungan Anak	Input	Jumlah Dana	Rp	118,800,000
				Output	Jumlah Sosialisasi Perlindungan Anak yang dilaksanakan	Kali	10
				Outcome	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	87.47
		1	Kegiatan Pembinaan Organisasi	Input	Jumlah Dana	Rp	150,000,000
				Output	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	Organisasi	25
				Outcome	Persentase Tenaga Kerja Perempuan dibidang pormal	%	10
		2	Penyuluhan bagi Ibu Rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Input	Jumlah Dana	Rp	50,000,000
				Output	Jumlah ibu rumah tangga yang mendapatkan penyuluhan	Kecamatan	3
				Outcome	Persentase Tenaga Kerja Perempuan dibidang pormal	%	10
		3	Visualisasi hasil kerja perempuan	Input	Jumlah Dana	Rp	50,000,000
				Output	Jumlah hasil karya perempuan yang dipublikasikan	Kali	1
				Outcome	Persentase Tenaga Kerja Perempuan dibidang pormal	%	10
		4	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Perempuan (Pelatihan Membatik)	Input	Jumlah Dana	Rp	50,000,000
				Output	Jumlah Peserta Perempuan yang Mengikuti Pendidikan	Orang	20
				Outcome	Persentase Tenaga Kerja Perempuan dibidang pormal	%	10
		5	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Perempuan (Pelatihan Tata Boga)	Input	Jumlah Dana	Rp	50,000,000
				Output	Jumlah Peserta Perempuan yang Mengikuti Pendidikan	Orang	20
				Outcome	Persentase Tenaga Kerja Perempuan dibidang pormal	%	10
		6	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Perempuan (Pelatihan Menjahit)	Input	Jumlah Dana	Rp	50,000,000
				Output	Jumlah Peserta Perempuan yang Mengikuti Pendidikan	Orang	20
				Outcome	Meningkatkannya Kapasitas Kelembagaan pengarusutamaan Gender (PUG) ditingkat Kecamatan	Kecamatan	20

Bangka, Januari 2017
Kepala Dinsos, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak



Dr. ARISLAN, M. Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 19590605 198611 1 001